

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA BERPIKIR, DAN PROPOSISI

2.1. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka adalah sebuah kegiatan yang melibatkan pengumpulan, analisis, dan penafsiran dari berbagai sumber ilmiah yang relevan dengan objek penelitian. Tujuan utama dari penyusunan kajian pustaka adalah untuk membentuk landasan pengetahuan yang sedang dilakukan sehingga mampu mencerminkan pemahaman peneliti terhadap suatu teori.

2.1.1. Kajian Peneliti Terdahulu

Kajian penelitian sebelumnya dimasukkan dalam penelitian ini sebagai bentuk untuk perbandingan. Adapun penelitian terdahulunya sebagai berikut:

1. Penelitian pertama oleh Muhammad Dion Amirudin dan Muh Ryan Rahmatul Hidayat yang berjudul “IMPLEMENTASI APLIKASI BANGKIT DALAM VALIDASI DAN VERIFIKASI ANGKA KEMISKINAN Sudi Di Kecamatan Lemahsugih, Kabupaten Majalengka”. Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa dari semua aspek yang disediakan dalam aplikasi BANGKIT dapat menentukan kondisi kemiskinan seseorang sehingga proses verifikasi dan validasi dapat terlaksana dengan baik walau terdapat berbagai permasalahan dalam proses verifikasi dan validasi seperti masalah jaringan internet yang belum menjangkau semua wilayah Kecamatan Lemahsugih serta aplikasi yang masih sering maintenance

hingga permasalahan dalam hal kesulitan akses menemukan masyarakat miskin dikarenakan kondisi geografis Kecamatan Lemahsugih yang berada di pegunungan sehingga jalanan yang dilalui cukup berliku dalam mendata warga miskin yang ada. Selain itu, dalam hal administrasi kependudukan ada sebagian warga yang NIK tidak tercatat dan kurangnya pembaharuan sehingga ada sebagian warga telah wafat namun masih tercatat dalam warga miskin.

2. Penelitian yang kedua oleh Niluh Okta Prema Dewi, Rhaka A. Arza, Irfan Setiawan, Zaki Fauza Hutasuht, yang berjudul “Pengabdian Masyarakat Melalui Pendataan Kemiskinan dengan Aplikasi BANGKIT Studi Praktik di Desa Garawastu Kecamatan Sindang, Majalengka”. Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan oleh Tim pengabdian Masyarakat yang turun langsung di lapangan menemukan permasalahan nyata di mana data penduduk miskin yang ada di Pemerintah pusat sangat tidak sesuai dengan data yang sebenarnya ada di desa Garawastu, di mana masih banyak penduduk yang tingkat ekonominya rendah tapi tidak terdaftar ke dalam data penduduk miskin. Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut dapat dilakukan dengan survei ulang menggunakan perangkat desa yang terlatih untuk mengumpulkan data kemiskinan secara langsung, memberikan pelatihan kepada perangkat desa terkait penggunaan teknologi dan sistem informasi digital, melakukan kolaborasi sistem pelaporan dua arah antara pusat dan desa, menyediakan fitur pelaporan mandiri dalam aplikasi untuk meningkatkan partisipasi Masyarakat, serta audit data kemiskinan di Desa Garawastu secara berkala.

Pemerintah perlu melakukan survei ulang data kemiskinan secara menyeluruh di Desa Garawastu untuk memastikan semua penduduk miskin terdaftar. Selain itu, Perlu diadakan kolaborasi sistem pelaporan dua arah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Desa terkait data kemiskinan. Pemerintah perlu menambahkan fitur pelaporan mandiri dalam aplikasi BANGKIT yang memungkinkan partisipasi masyarakat untuk melaporkan status ekonomi mereka sendiri dengan bukti pendukung yang valid.

3. Penelitian ketiga oleh Nabila Septia Warman, Syamsir, Muhammad Maldini, Over Nurhasanah, Nadya Rahmah Oktariandani, Iqnur Hafizh Syafikruzi, yang berjudul “Implementasi Inovasi Kebijakan Dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kota Pekanbaru”. Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) di kota Pekanbaru, sudah ada beberapa kantor dinas pemerintahan di Kota Pekanbaru yang telah menerapkan Kebijakan SPBE, salah satunya adalah Dinas Komunikasi dan Informasi Kota pekanbaru. Inovasi layanan dalam penyelenggaraan SPBE menjadi hal yang sangat penting dalam menjawab tuntutan masyarakat dalam memberikan kemudahan pelayanan administrasi dengan tetap menjaga kualitas pelayanan publik itu sendiri. Inovasi layanan masyarakat merupakan kewajiban untuk pemerintah guna mengatasi kebutuhan publik yang terus berkembang sehingga pemerintah harus melakukan berbagai upaya untuk dapat berinovasi terutama terkait pemberian layanan yang optimal kepada publik sehingga dapat menjadikan kemudahan terutama dalam proses akses layanan yang diberikan

pemerintah untuk publik sekaligus menjadi bentuk pertanggungjawaban negara untuk masyarakatnya. Dalam ruang lingkup layanan SPBE “Inovasi sebagai ciri Smart city Pekanbaru” maka Diskominfo Kota Pekanbaru membuat beberapa jenis inovasi baik untuk pelayanan publik (G2C,G2B) maupun untuk Tata kelola pemerintahan Diskominfo itu sendiri.

4. Penelitian keempat oleh Fadila Putri Utami, Gustafianul Shiddiq Akbar, Hajria, Ni KMG Tri Purwati, yang berjudul “IMPLEMENTASI INOVASI KEBIJAKAN DALAM PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) DI KABUPATEN DONGGALA”. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Kabupaten Donggala menunjukkan potensi yang signifikan, namun juga menghadapi berbagai tantangan yang perlu diatasi. Dalam dimensi penadbiran, penelitian mengungkapkan bahwa komunikasi antara pemerintah dan masyarakat masih kurang efektif. Banyak warga yang belum memahami sepenuhnya manfaat dan cara menggunakan aplikasi perizinan online, seperti OSS. Selain itu, dukungan anggaran untuk pengembangan dan pemeliharaan SPBE sangat minim, sehingga menghambat efektivitas implementasi kebijakan. Koordinasi antar lembaga pemerintahan juga menjadi masalah, di mana masing-masing departemen sering memiliki visi dan strategi yang berbeda-beda, sehingga kerja sama yang harmonis sulit dicapai. Hambatan utama dalam dimensi ini meliputi kurangnya kompetensi staf teknis, biaya operasional yang tinggi, serta perubahan pola pikir pegawai yang tidak siap untuk beradaptasi dengan teknologi baru.

Tabel 2.1
Kajian Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul penelitian	Persamaan dan Perbedaan			
			Teori yang digunakan	Pendekatan	Metode	Teknik Analisis
1.	Muhammad Dion Amirudin, Muh Ryan Rahmatul Hidayat (2024)	IMPLEMENTASI APLIKASI BANGKIT DALAM VALIDASI DAN VERIFIKASI ANGKA KEMISKINAN Sudi Di Kecamatan Lemahsugih, Kabupaten Majalengka	Chambers (1995) tentang kemiskinan sebagai kondisi yang dinamis dan spesifik Carter dan Barrett (2006), aspek struktural seperti pencapaian pendidikan, akses kesehatan, dan kepemilikan, Cleary dan Quinn (2016) tentang inovasi digital yang meningkatkan efisiensi sektor publik	Kualitatif	Deskriptif	Observasi lapangan dan wawancara
2.	Niluh Okta Prema Dewi, Rhaka A. Arza, Irfan Setiawan, Zaki Fauza Hutasuhut (2024)	Pengabdian Masyarakat Melalui Pendataan Kemiskinan dengan Aplikasi BANGKIT Studi Praktik di Desa Garawastu Kecamatan Sindang, Majalengka	Abu Huraerah (2013) Kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan multidimensi yang memerlukan pendekatan multidisiplin. Stanislaus Riyanta & Paramita Nur Kurniati (2019) Penguatan kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah juga krusial dalam menanggulangi kemiskinan secara efektif	Kualitatif	Studi kasus	Observasi lapangan, wawancara, dan dokumentasi

			Pemerintah mengandalkan survei untuk mengidentifikasi populasi miskin untuk penyaluran bantuan sosial (I. M. Suyasa et al., 2022).			
3.	Nabila Septia Warman, Syamsir, Muhammad Maldini, Over Nurhasanah, Nadya Rahmah Oktariandani, Iqnur Hafizh Syafikruzi (2022)	Implementasi Inovasi Kebijakan Dalam Penyelenggaraa n Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kota Pekanbaru	<p>Pemberian layanan publik yang optimal juga menuntut adanya inovasi yang dapat meningkatkan kualitas (suhunoharso dalam Fathurrahman 2020: 14)</p> <p>Situmorang Chazali (2016) Implementasi kebijakan juga merupakan bagian dari tahapan kebijakan masyarakat serta merupakan variabel utama dengan andil signifikan atas kesuksesan dari kebijakan tersebut untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat.</p> <p>Carl J Frederick dalam Leo Agustina (2008: 7) menjelaskan bahwasanya pengertian dari kebijakan adalah serangkaian tingkah laku yang dibuat oleh seseorang, komunal maupun pemerintahan</p>	Kualitatif	Deskriptif	Observasi lapangan dan wawancara

			<p>dalam cakupan tertentu yang di dalamnya sering ditemukan hambatan dan juga peluang atas implementasi dari usulan yang telah dilakukan untuk meraih tujuan yang ditetapkan. Studi tentang kebijakan sendiri adalah suatu penelitian yang bertujuan guna merepresentasikan, melakukan analisis dan juga memberikan uraian dengan cermat terkait adanya hubungan kausalitas dari setiap perbuatan pemerintah. Berdasarkan pendapat dari Thomas R Day (soeharno 2010:14)</p>			
4.	<p>Fadila Putri Utami, Gustafianul Shiddiq Akbar, Hajria, Ni KMG Tri Purwati (2023)</p>	<p>IMPLEMENTASI INOVASI KEBIJAKAN DALAM PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) DI KABUPATEN DONGGALA</p>	<p>Taufik (2005) berpendapat, pentingnya mendorong koherensi dalam kebijakan inovasi.</p> <p>Menurut Mulyadi (Mulyadi, 2005, pp. 129-133), Implementasi mengacu pada rangkaian langkah yang diambil untuk merealisasikan tujuan yang telah ditentukan dalam sebuah keputusan.</p> <p>implementasi diartikan sebagai serangkaian tindakan yang</p>	Kualitatif	Deskriptif	<p>Observasi lapangan, wawancara dan dokumentasi</p>

			<p>dilakukan oleh individu, pejabat, atau kelompok, baik dari pemerintah maupun swasta, yang bertujuan untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dalam suatu kebijakan (Tahir, 2014, p. 55)</p> <p>Ekawati (Taufik & Isril, 2013) Menyatakan bahwa “implementasi secara eksplisit mencakup tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dari sektor publik maupun swasta, yang secara langsung bertujuan untuk mencapai serangkaian sasaran yang telah ditentukan dalam keputusan kebijakan yang dibuat sebelumnya.”</p>			
--	--	--	--	--	--	--

2.1.2. Konsep Administrasi Publik

Administrasi berasal dari bahasa Yunani “administrare”, yang berarti memberikan pelayanan dan bantuan. Secara etimologis administrasi adalah seluruh kegiatan yang dilakukan untuk melayani dan membantu dalam mencapai tujuan bersama. Secara umum administrasi adalah seluruh kegiatan, mulai dari pengaturan hingga pengurusan segala hal, yang dilakukan untuk mencapai tujuan bersama. Dalam arti luas, administrasi diartikan sebagai aktivitas kerja sama oleh sekelompok orang yang didasarkan pada pembagian kerja, sesuai yang telah

ditentukan dalam struktur, dilakukan untuk mencapai tujuan bersama secara efektif dan efisien.

Administrasi publik adalah ilmu sosial yang mempelajari bagaimana kebijakan publik dikelola. Ini mencakup berbagai aspek, seperti birokrasi, penyusunan, pengimplementasian, dan pengevaluasian kebijakan publik, administrasi pembangunan, pemerintahan daerah, dan lainnya.

Administrasi publik menurut Chandler dan Plano dalam Keban (2008:4) adalah proses dimana sumber daya personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola (manage) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Chandler dan Plano dalam hal ini menekankan bahwa administrasi publik adalah sebuah proses. Ini berarti bahwa administrasi publik bukanlah sesuatu yang statis, melainkan serangkaian tindakan yang berkelanjutan. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa administrasi publik merupakan suatu proses yang dilakukan oleh orang-orang yang bekerja di pemerintahan untuk membuat, menjalankan, dan mengelola Keputusan-keputusan yang berkaitan dengan kebijakan publik.

Siagian dalam Waluyo (2007:37) mengatakan “administrasi publik sebagai keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh aparatur pemerintahan dari suatu negara dalam usaha mencapai tujuan negara”. Disini dapat disimpulkan bahwa administrasi publik adalah keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh aparatur pemerintahan. Ini berarti administrasi publik mencakup semua Tindakan dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah. Siagian juga menggambarkan

administrasi publik sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan nasional. Dengan kata lain, administrasi publik adalah pemerintah mewujudkan visi dan misi negara.

Menurut Waldo dalam Syafei (2003:33) “administrasi publik adalah manajemen dan organisasi dari manusia dan peralatannya guna mencapai tujuan pemerintah”. Waldo menekankan bahwasannya administrasi publik adalah manajemen dan organisasi dari manusia dan peralatannya untuk mencapai tujuan pemerintah. Hal ini melibatkan pengaturan dan penggunaan sumber daya untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Kemudian Keban (2014:7) menyatakan bahwa ada beberapa makna penting yang harus diingat berkenaan dengan hakikat administrasi publik, antara lain sebagai berikut:

- 1) Bidang tersebut lebih berkaitan dengan dunia eksekutif, meskipun juga berkaitan dengan dunia yudikatif dan legislatif.
- 2) Bidang tersebut berkenaan dengan formulasi dan implementasi kebijakan publik.
- 3) Bidang tersebut juga berkaitan dengan berbagai masalah manusiawi dan usaha kerjasama untuk mengerjakan tugas-tugas pemerintah.
- 4) Meskipun bidang tersebut berbeda dengan administrasi swasta tetapi ia overlapping dengan administrasi swasta .
- 5) Bidang tersebut diarahkan untuk menghasilkan public goods dan services.
- 6) Bidang ini memiliki aspek teoritis dan praktis.

Sebagaimana dijelaskan oleh Keban (2014), maka dapat disimpulkan bahwa:

“Administrasi publik mencakup semua hal yang berkaitan dengan hubungan antara negara dan masyarakat, tanpa terkecuali pihak swasta, dan didukung dengan pembuatan dan pelaksanaan kebijakan yang menghasilkan barang publik dan pelayanan. Jadi, peneliti mengatakan bahwa pelayanan adalah komponen penting dari administrasi publik, dan tujuan administrasi publik menghasilkan pelayanan yang baik.”

Adapun peran administrasi publik menurut Gray (1989:15-16) dalam buku “Teori Administrasi Publik” (2012:9) menjelaskan poin penting peran daripada administrasi publik dalam masyarakat sebagai berikut:

1. Menjamin pemerataan distribusi pendapatan nasional secara inklusif kepada kelompok masyarakat kurang mampu atau miskin dengan berdasarkan prinsip keadilan.
2. Memberi perlindungan kepada hak-hak rakyat atas kepemilikan kekayaan serta adanya penjaminan kebebasan bagi rakyat agar dapat melaksanakan tanggung jawab atas diri mereka sendiri dalam sektor pelayanan strategis seperti bidang Kesehatan, Pendidikan, dan pelayanan utamanya bagi masyarakat lanjut usia.
3. Melestarikan nilai tradisi masyarakat yang amat bervariasi serta memberi jaminan dan dukungan sumber-sumber sehingga nilai-nilai akan mampu berkembang sesuai relevansi perubahan zaman serta selaras dengan budaya lain di lingkungannya.

Dapat disimpulkan dalam hal ini Gray menekankan bahwa administrasi public memiliki peran penting dalam menciptakan masyarakat yang adil,

Sejahtera, dan berbudaya. Peran ini tidak hanya terbatas pada pengelolaan birokrasi, akan tetapi juga mencakup upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

2.1.3. Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah serangkaian keputusan, tindakan, atau program yang diambil oleh pemerintah atau lembaga berwenang untuk mengatasi masalah tertentu dalam masyarakat. Kebijakan ini dibuat untuk mencapai tujuan tertentu yang berkaitan dengan kepentingan publik, seperti kesejahteraan sosial, keamanan, kesehatan, pendidikan, dan ekonomi.

Menurut Eyestone (1971) “Kebijakan publik adalah hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya”. Definisi ini menekankan bagaimana kebijakan publik menghubungkan pemerintah dengan masyarakat dan faktor-faktor eksternal yang mempengaruhinya. Ini juga menunjukkan bahwa kebijakan publik adalah proses dinamis yang terus berubah seiring dengan perubahan lingkungan.

Menurut Eastone (1969) menyatakan Kebijakan publik adalah pengalokasian nilai-nilai (values) secara otoritatif kepada masyarakat”. Dalam hal ini, David Eastone menyoroti peran pemerintah dalam mendistribusikan sumber daya dan nilai-nilai yang dianggap penting dalam masyarakat.

Adapun Friedrich (1963) mendefinisikan kebijakan publik sebagai berikut:

“Kebijakan publik adalah suatu tindakan atau serangkaian tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan dan peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan cara-cara untuk mencapai tujuan atau merealisasikan tujuan atau sasaran yang telah ditentukan.”

Disini Friedrich menekankan bahwa kebijakan publik adalah suatu tindakan atau serangkaian tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah. Tindakan-tindakan ini dilakukan dalam suatu lingkungan tertentu yang memiliki hambatan dan peluang untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Menurut Winarno (2007) “Kebijakan publik adalah suatu proses negara (pemerintah) dalam membuat keputusan-keputusan yang secara prinsip merupakan pilihan di antara berbagai alternatif”. Winarno menekankan bahwa kebijakan publik adalah Tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, bukan individu atau organisasi swasta. Ini juga menunjukkan bahwa kebijakan publik melibatkan serangkaian langkah, mulai dari identifikasi masalah hingga evaluasi hasil. Oleh karena itu, kebijakan publik adalah hasil dari pilihan yang dibuat oleh pemerintah. Dalam hal ini seharusnya pemerintah selalu memiliki beberapa opsi yang tersedia ketika menghadapi masalah publik. Serta pembuatan kebijakan publik melibatkan evaluasi dan perbandingan alternatif-alternatif untuk memilih yang terbaik. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa pemerintah membuat kebijakan adalah hasil dari pemilihan dari beberapa opsi.

Menurut Waldo (1984) secara umum ia menekankan bahwa “kebijakan publik adalah cerminan dari nilai-nilai masyarakat dan memiliki dimensi etika yang kuat”. Waldo menekankan bahwa kebijakan publik bukan sekedar serangkaian keputusan teknis, melainkan dari cerminan nilai-nilai masyarakat. Ini berarti kebijakan publik mencerminkan baik dan benar oleh masyarakat. Nilai-nilai ini dapat berupa keadilan, kesetaraan, kebebasan, keamanan. Dan dimensi yang kuat, dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik harus didasarkan pada prinsip-

prinsip moral dan etika. Serta harus mempertimbangkan dampak etis dari Keputusan terhadap masyarakat.

Mustopadidjaja AR (1994) “Kebijakan publik adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak”. Definisi ini menekankan bahwa kebijakan publik adalah alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah kumpulan dari ide dan prinsip, yang menjadi dasar dari rencana pemerintah dalam melakukan tindakan.

Menurut Dunn (2003) secara etimologis:

“Istilah *policy* atau kebijakan berasal dari bahasa Yunani, Sanskerta, dan Latin. Dalam perkembangannya, kata *policy* dalam bahasa Yunani dan *pur* dalam bahasa Sanskerta, yang berarti kota atau negara-kota, mengalami perubahan menjadi *politia* dalam bahasa Latin yang merujuk pada negara. Kemudian, dalam bahasa Inggris pertengahan, istilah ini berkembang menjadi *policie*, yang bermakna pengelolaan urusan publik dan administrasi pemerintahan.”

Secara etimologis ini menunjukkan bahwa konsep kebijakan telah ada sejak zaman kuno, dan selalu berkaitan dengan pengelolaan urusan publik. Dalam perkembangan makna istilah ini mencerminkan evolusi konsep negara dan pemerintahan. Hal ini memberikan pemahaman bahwa pada dasarnya kebijakan adalah sesuatu yang berhubungan dengan pengelolaan negara.

2.1.4. Inovasi Kebijakan

Inovasi kebijakan adalah proses penciptaan atau penerapan kebijakan baru yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan responsivitas terhadap permasalahan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Inovasi kebijakan dapat

berupa perubahan dalam peraturan, prosedur, atau pendekatan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Inovasi kebijakan membutuhkan kreativitas dalam menemukan ide-ide baru yang relevan dan dapat diterapkan. Ide-ide ini bisa berasal dari berbagai sumber, termasuk pemerintah, masyarakat, akademisi, dan sektor swasta. Hal ini harus diimplementasikan secara efektif agar dapat memberikan dampak positif. Dalam proses implementasi melibatkan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan.

Menurut Rogers (2003), “Inovasi kebijakan melibatkan ide, praktik, atau objek baru yang diadopsi oleh suatu sistem untuk mencapai tujuan tertentu”. Sementara itu, Mulgan & Albury (2003) menyatakan bahwa “Inovasi kebijakan berfokus pada penciptaan solusi baru yang lebih baik dibandingkan pendekatan yang sudah ada”.

Hartley (2005) menyatakan “Inovasi kebijakan adalah perubahan yang disengaja dalam kebijakan dan proses administratif yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga publik untuk meningkatkan kinerja dan memberikan manfaat bagi masyarakat”.

Adapun Windrum dan Koch (2008) berpendapat bahwa “Inovasi kebijakan adalah proses eksperimen dan adaptasi dalam perumusan kebijakan yang melibatkan berbagai actor untuk menemukan Solusi yang lebih efektif bagi masalah yang berkembang”.

Sementara itu, Dwiyanto (2011) mengemukakan “inovasi kebijakan harus berorientasi pada peningkatan kualitas layanan publik, akuntabilitas, dan partisipasi

masyarakat”. Dalam hal ini, Dwiyanto mengemukakan bahwa salah satu tantangan utama inovasi kebijakan adalah resistensi birokrasi terhadap perubahan.

Dapat disimpulkan bahwa inovasi kebijakan adalah penerapan ide atau perubahan baru dalam kebijakan publik yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan nilai publik. Inovasi ini dapat berbentuk perubahan dalam proses, struktur, teknologi, atau program dalam pemerintahan dan pelayanan publik.

2.2. Kerangka Berpikir

Berdasarkan penelitian ini, peneliti mengacu kepada teori-teori yang berhubungan dengan fokus penelitian sebagai dasar pedoman yang sesuai dengan kenyataan sehingga menghasilkan Kesimpulan secara objektif.

Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan Teori Difusi Inovasi dari Everett Rogers (2003) menjelaskan bagaimana inovasi diperkenalkan, di sebarluaskan, dan diadopsi oleh individu atau organisasi. “Inovasi adalah suatu ide, praktik, atau objek yang dianggap baru oleh individu atau kelompok yang mengadopsinya” Rogers menekankan bahwa kebaruan dalam inovasi bersifat relatif, sesuatu bisa dianggap inovasi di satu organisasi atau komunitas tetapi sudah dikenal di organisasi atau komunitas lain. Lima faktor utama yang memengaruhi adopsi inovasi adalah:

1. Keunggulan Relatif (Relative Advantage)

Keunggulan relatif mengacu pada sejauh mana inovasi lebih baik dibandingkan metode atau sistem sebelumnya. Jika suatu inovasi memberikan manfaat yang lebih besar, maka kemungkinan adopsinya akan lebih tinggi.

2. Kesesuaian (Compatibility)

Kesesuaian menunjukkan seberapa baik inovasi cocok dengan nilai, kebutuhan, dan sistem yang sudah ada dalam organisasi atau masyarakat. Jika suatu inovasi sesuai dengan kondisi yang ada, maka adopsinya akan lebih cepat.

3. Kompleksitas (Complexity)

Kompleksitas mengacu pada sejauh mana inovasi sulit untuk dipahami dan digunakan. Semakin rumit inovasi tersebut, semakin kecil kemungkinan seseorang atau organisasi mengadopsinya.

4. Dapat Diuji Coba (Trialability)

Dapat diuji coba berarti inovasi dapat dicoba dalam skala kecil sebelum diterapkan secara luas. Jika inovasi memungkinkan pengujian tanpa risiko besar, maka adopsi akan lebih cepat.

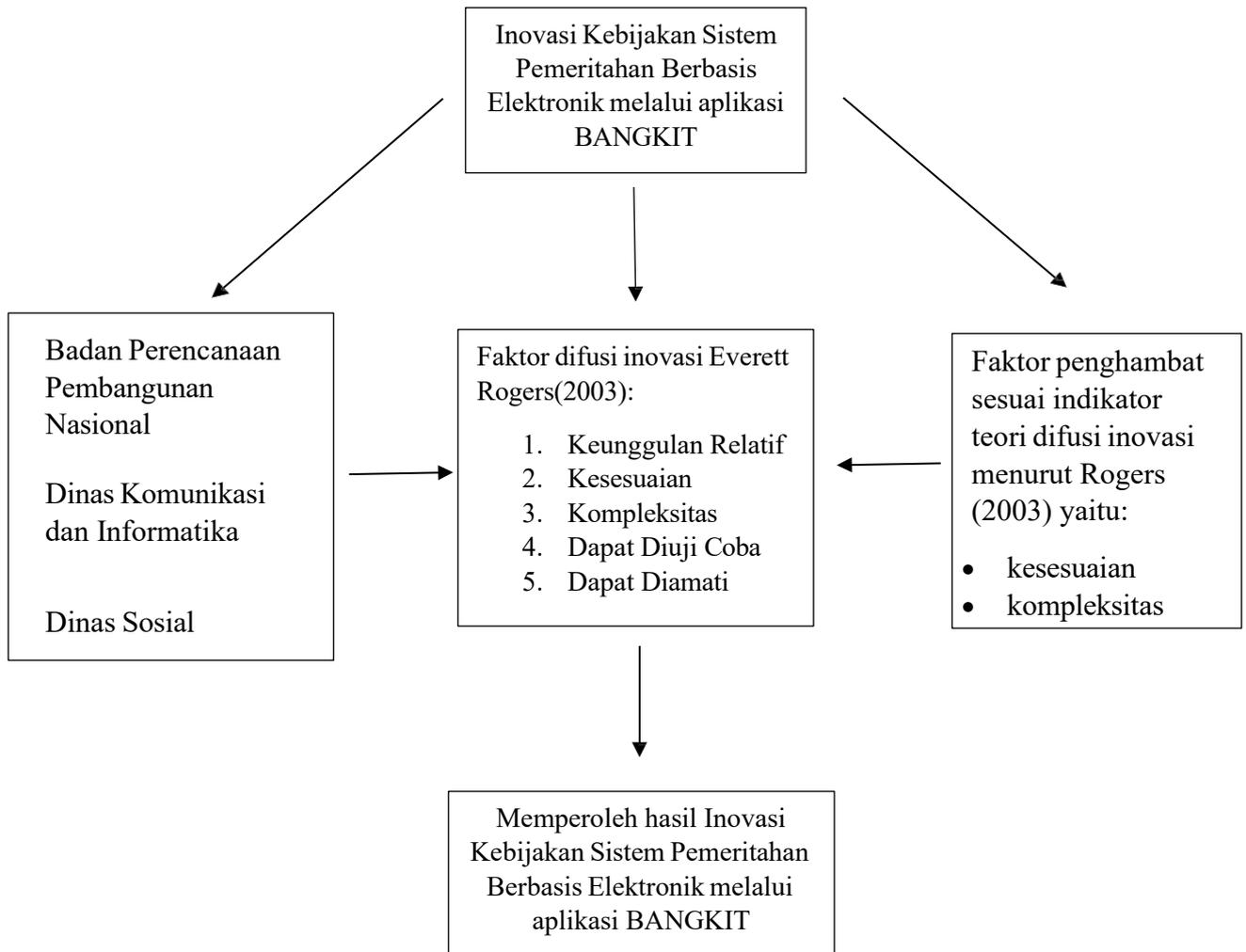
5. Dapat Diamati (Observability)

Dapat diamati mengacu pada seberapa jelas manfaat inovasi dapat dilihat oleh orang lain. Jika manfaat suatu inovasi dapat terlihat dengan cepat, maka tingkat adopsinya akan lebih tinggi.

Berdasarkan pemaparan di atas, penelitian ini akan menganalisis kelima faktor ini bisa mempengaruhi proses inovasi kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang dilakukan Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka melalui aplikasi BANGKIT, Serta faktor penghambat dalam implementasi inovasi kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik melalui

aplikasi BANGKIT di Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka. Adapun bagan kerangka berpikir sebagai berikut.

Gambar 2.2
Kerangka Berpikir



2.3. Proposisi

Proposisi adalah asumsi sementara dari penelitian tentang fenomena-fenomena permasalahan yang terjadi. Peneliti mengusulkan penelitian tentang

kondisi yang terjadi, dan sejalan dengan rumusan masalah yang sudah dijelaskan sebagai berikut:

1. Inovasi kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang dilakukan Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka melalui aplikasi BANGKIT ditentukan oleh lima faktor yaitu keunggulan relatif, kesesuaian, kompleksitas, dapat diuji coba, dapat diamati sesuai dengan teori dari Everett Rogers.
2. Adanya faktor penghambat sesuai indikator teori difusi inovasi menurut Rogers (2003) yaitu kesesuaian dan kompleksitas. dalam implementasi inovasi kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik melalui aplikasi BANGKIT Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka.